

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan terkait dengan latar belakang masalah yang ada di lapangan yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia yang berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kini telah berusia lebih dari 67 tahun sejak kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, sampai saat ini masih dihadapkan pada sebuah tantangan besar yakni bagaimana mempertahankan bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaannya. Sebagai sebuah negara yang terdiri atas beranekaragam suku, agama dan ras, serta wilayahnya yang sangat luas terdiri atas ribuan pulau, bangsa Indonesia harus tetap memiliki daya pengikat yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu nasionalisme.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan: “Batas Wilayah Negara adalah garis batas Wilayah Negara yang merupakan pemisah

kedualatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional”. Sedangkan pasal 1 ayat (2) “Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak di sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan nagara lain, dalam batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan”.

Definisi batas wilayah dan kawasan perbatasan di atas, sebenarnya memberikan gambaran bahwa wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Wilayah perbatasan, akan berimplikasi kepada hubungan dengan negara tetangga. Terkait hal ini, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 34 tahun 2012 pasal 1 ayat (4) tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bertugas Secara Penuh Pada Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan/Atau Wilayah Perbatasan, mendefinisikan wilayah perbatasan, yakni “Wilayah perbatasan adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis bersinggungan langsung dengan garis batas antarnegara yang meliputi kawasan perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini”.

Peraturan tersebut secara teoritis, perbatasan memiliki fungsi yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi perbatasan negara: pertama sebagai garis pertahanan suatu negara; kedua sebagai pelindung kegiatan ekonomi dalam wilayah; ketiga fungsi hukum; empat batas wilayah kekuasaan negara, dan kelima, sebagai aspek kepentingan suatu negara.

Fungsi-fungsi tersebut di atas, memperjelas bahwa ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka NKRI. Keamanan wilayah perbatasan mulai menjadi *concern* setiap pemerintah yang wilayah negaranya

berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya.

Pertahanan dan keamanan nasional di wilayah perbatasan yang perlahan mengancam kedaulatan negara, semakin diperparah lagi dengan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Dalam memasuki era globalisasi ini, mau tidak mau bangsa kita harus mampu berkompetisi di dunia yang cenderung tanpa batas. Globalisasi identik dengan konsep pengurangan kedaulatan sebuah negara, penghilangan batas wilayah sebuah negara, kecanggihan teknologi, penyempitan ruang dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan kepada pemikiran perdagangan bebas.

Menurut Cohen dan Kennedy (Setiadi, Elly M., dan Setiadi, Usman (2010: 688-689) berpendapat bahwa globalisasi dipahami sebagai seperangkat transformasi yang semakin memperkuat dunia yang meliputi hal-hal berikut:

1. Perubahan dalam konteks ruang dan waktu. Perkembangan produk seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya.
2. Pasar dan produksi ekonomi di negara yang berada menjadi saling tergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan.
3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita, dan olah raga internasional).
4. Meningkatnya masalah bersama seperti: ekonomi, lingkungan, permasalahan lazim lainnya seperti berbagai macam penyakit.

Sementara itu, menurut Emanuel Richter John Baylis & Steve Smith. (2001:15) menyatakan bahwa:

globalisasi merupakan jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpecah-pecah dan terisolasi dalam planet ini ke dalam ketergantungan yang saling menguntungkan, dan juga globalisasi juga

yang mempersatukan dunia. Secara eksplisit menurut beliau bahwa ”*die globalisierung...global networking that has welded together previously disparate and isolated communities on this planet into mutual dependence and unity of 'on world'* (Emanuel Richter, translated from German)

Globalisasi memang menyatukan dunia, seolah tak ada jarak, tetapi globalisasi pun akan berdampak negatif juga pada kehidupan sebuah bangsa. Seperti yang dikemukakan (Tilaar (2002:4) bahwa ”dampak negatif globalisasi yang utama ialah globalisasi akan dapat mengancam budaya bangsa”. Sejalan dengan hal tersebut, maka masalah nasionalisme bangsa Indonesia sangatlah kompleks, kepercayaan diri dan kebanggaan akan simbol budaya bangsa sendiri semakin menunjukkan penurunan akhir-akhir ini.

Semangat nasionalisme pada masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dengan negara lain yang pada dekade terakhir ini sudah mulai menunjukkan gejala semakin memudar. Hal ini terlihat dari adanya fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat perbatasan, dengan kehadiran produk-produk negara lain baik secara fisik maupun non-fisik, serta lemahnya wawasan kebangsaan masyarakat perbatasan semakin membuktikan lemahnya semangat nasionalisme bangsa.

Salah satu daerah perbatasan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi memprihatinkan terkait dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Entikong ini digambarkan dari hasil penelitian tentang Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Perbatasan oleh Wismayanti, Yanuar Farida (2012:15), yakni sebagai berikut:

Berbagai situasi anak-anak masih menunjukkan adanya pelanggaran atas hak anak, khususnya di daerah perbatasan. Kondisi anak-anak di perbatasan sebagian mengalami putus sekolah, pernikahan usia dini ataupun terpaksa menikah dengan cukong Malaysia yang kaya raya di usia anak-anak, belum terpenuhinya hak identitas dalam bentuk akta kelahiran, masih adanya anak-anak yang bekerja baik sebagai pengisi borang, kuli angkut, ndompleng

(menyelam di sungai untuk mencari batu permata atau intan), maupun sebagai buruh ataupun pembantu rumah tangga di Malaysia. Masih adanya pelanggaran atas hak anak, menunjukkan belum adanya perlindungan anak atas anak-anak, khususnya yang melibatkan masyarakat dan *stakeholder*.

Kondisi di atas, bisa jadi karena tidak baiknya proses pendidikan sehingga pengenalan simbol-simbol kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia seperti bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan sebagainya sangat minim sekali. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga terjadi pada anak-anak usia sekolah yang bahkan mereka tidak tahu mengenai identitas nasionalnya.

Kejadian yang tidak kalah memprihatinkan pada masyarakat Entikong yaitu tentang masalah kesehatan. Sebagaimana dikutip dari *Republika.co.id*, (23 Maret 2013, *Soal Berobat, Warga Entikong Pilih ke Malaysia*), yakni:

Sejumlah masyarakat Entikong, Kalimantan Barat, lebih memilih berobat lanjutan ke Kuching, Malaysia, dibanding ke Kota Sanggau. Penyebabnya yakni lokasi yang jauh dari rumah sakit rujukan dan akses infrastruktur yang buruk. "Masyarakat yang dirujuk dari puskesmas ke RSUD Sanggau, lebih memilih berobat ke Malaysia," kata Kepala Puskesmas Entikong Hidayat Samiaji.

Peristiwa di atas merupakan sebuah bukti bahwa tidak ada upaya pemerintah secara maksimal dalam memperhatikan masyarakat perbatasan. Karakteristik gaya hidup yang penuh persaingan sehingga masyarakat dipaksa untuk membenahi diri dan mengikuti perubahan yang sangat cepat. Sementara itu, kebutuhan pokok yang terabaikan sehingga perlahan memperlemah nilai nasionalisme anak negeri. Seperti apa yang dikemukakan Komalasari (2007:554) bahwa:

...saat ini di sinyalir bahwa nasionalisme bangsa Indonesia rapuh dalam menghadapi gejala-gejala muthakir berupa solidaritas parochial dan kekuatan eksternal akibat pengaruh globalisasi, baik kekuasaan kolonial, penetrasi transnational corporation, multinational corporation, maupun lembaga-lembanga internasional lainnya.

Ancaman akan nasionalisme muncul dari masyarakat dalam ruang yang lebih sempit, yaitu suatu sifat kedaerahan atau nasionalisme yang sempit berupa kesukuan. Sementara itu, Tilaar (2002:1) mengatakan bahwa “perubahan global yang sedang terjadi kini merupakan suatu revolusi global yang melahirkan suatu gaya hidup (*a new life style*)”. Gaya hidup global cepat diserap oleh masyarakat akibat majunya arus informasi yang dihasilkan oleh teknologi. Namun sebaliknya, simbol budaya asing justru lebih diminati dan semakin populer di kalangan generasi muda saat ini. Interaksi tanpa batas yang terjadi pada generasi muda dengan warganegara lain membawa dampak yang dapat mempengaruhi pola pikir, sifat dan perilaku mereka baik kearah positif maupun negatif.

Ini berarti manusia Indonesia harus dipersiapkan untuk menghadapi masyarakat global. Sementara itu, di daerah-daerah, pemerintah tidak siap untuk melaksanakan desentralisasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan pada terbentuknya suatu kelompok yang tidak lagi sebagai masyarakat bangsa Indonesia, melainkan masyarakat yang terkotak-kotak berbasiskan etnis, agama, suku, ras dan sebagainya.

Kegagalan dalam menjalankan dan mendistribusikan *output* dalam berbagai agenda pembangunan nasional secara lebih adil akan berdampak negatif pada persatuan dan kesatuan bangsa. Di satu sisi sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia yang terdiri atas beranekaragam suku, agama dan ras sangat rentan menjadi ancaman terhadap nasionalisme. Menurut Liliweri (2005:5) menyakatan bahwa:

suka atau tidak suka, entah dengan alasan teoritis maupun ilmiah, gambaran tentang perbedaan yang sedang kita alami dalam masyarakat mengungkapkan bahwa dari dasar-dasarnya berasal dari kelompok tertentu yang kita sebut kelompok etnik.

Letak wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bukan tidak mungkin bahwa kondisi ini semakin menghimpit semangat

nasionalisme anak bangsa, terutama anak-anak yang merupakan bagian dari masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Mereka bisa kena pengaruh bangsa lain, atau terjebak oleh rasa ke daerahan karena etni mereka sendiri.

Nasionalisme sebuah bangsa menentukan arah pergerakan bangsa tersebut kepada pilihan yang lebih buruk atau lebih baik. Tanpa adanya nasionalisme, tidak akan ada visi, tidak akan ada kedaulatan, dan tidak akan ada perubahan positif bagi bangsa ini. Untuk itulah nasionalisme dan semangat kebangsaan perlu dibina, baik oleh individu warganegara maupun pemerintah. Sebab nasionalisme dan semangat kebangsaan tidak dapat terpelihara dengan sendirinya, melainkan perlu pembinaan secara berkesinambungan dari berbagai pihak, baik individu, keluarga, sekolah maupun masyarakat.

Daerah perbatasan khususnya perlu mendapat pembinaan yang berkesinambungan. Bagi masyarakat daerah perbatasan semangat nasionalisme yang semakin menurun akibat pengaruh kosmopolitanisme dan etnisitas adalah hal utama yang harus mendapat perhatian. Dalam kaitannya dengan hal ini, Tri Poetranto dalam Buletin Puslitbang Strahan Balitbang Dephan (2008:4-6) mengemukakan nilai strategis mengapa daerah perbatasan perlu diperhatikan pembinaannya, antara lain:

1. Daerah perbatasan mempunyai pengaruh penting bagi kedaulatan negara;
2. Daerah perbatasan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya;
3. Daerah perbatasan mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara; dan
4. Daerah perbatasan mempunyai pengaruh terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional

Di sisi lain, semangat nasionalisme dalam suatu bangsa yang terbangun sejak zaman kemerdekaan lalu masih tetap relevan dengan dunia masa kini. Bagi Indonesia, rumusan paham kebangsaan nasional Indonesia telah tercantum dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membangun sebuah negara

kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, membina persahabatan dalam pergaulan antar bangsa, menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan keadilan, serta menolak penjajahan dan segala bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Upaya mengembangkan paham kebangsaan itu dengan sendirinya akan menyesuaikan diri dengan tantangan perubahan zaman. Namun, esensinya sama sekali tidak berubah. Nasionalisme harus memperkuat posisi ke dalam dengan memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nasionalisme yang harus dibangkitkan kembali adalah nasionalisme yang diarahkan untuk mengatasi semua permasalahan, bagaimana bisa bersikap jujur, adil, disiplin, berani melawan kesewenang-wenangan, tidak korup, toleran, dan lain-lain.

Pada umumnya daerah perbatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan.

Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, hal semacam inilah yang perlu untuk dihindari terutama bagi masyarakat di daerah perbatasan. Penanganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah.

Dari uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih mendalam tentang masalah yang berkaitan dengan pentingnya “Tantangan Penguatan Komitmen

Kebangsaan Untuk Membangun Karakter Warga Negara Pada Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Pada Masyarakat Entikong Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia)”.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu masalah pokok atau fokus penelitian yakni” Bagaimanakah Tantangan Penguatan Komitmen Kebangsaan Untuk Membangun Karakter Warga Negara Pada Masyarakat Perbatasan agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan dalam penganalisan terhadap hasil penelitian,maka masalah pokok tersebut di jabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan penguatan komitmen kebangsaan untuk membangun karakter warga negara pada masyarakat perbatasan ?
2. Bagaimana karakteristik bauran budaya perbatasan dalam konteks pembangunan karakter kebangsaan?
3. Bagaimana alternatif pemecahan bagi peningkatan karakter warga negara masyarakat Entikong wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan menggali, mengkaji dan mengungkapkan Bagaimanakah Tantangan Penguatan Komitmen Kebangsaan Untuk Membangun Karakter Warga Negara Pada Masyarakat Perbatasan.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan mengetahui informasi tentang:

- a. Tantangan penguatan komitmen kebangsaan untuk membangun karakter warga negara pada masyarakat perbatasan
- b. karakteristik bauran budaya perbatasan dalam konteks pembangunan karakter kebangsaan
- c. Alternatif pemecahan bagi peningkatan karakter warga negara masyarakat Entikong wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

D. Mamfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan mamfaat baik secara keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoritik, penelitian ini akan menggali dan mengungkapkan Tantangan Penguatan Komitmen Kebangsaan Untuk Membangun Karakter Warga Negara Pada Masyarakat Perbatasan (*Studi Kasus Pada Masyarakat Entikong Wilayah PerbatasanIndonesia-Malaysia*)

Dari temuan tersebut di harapkan dapat memberikan mamfaat bagi berbagai pihak, terutama sebagaimana yang diuraikan berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan kontribusi kearah sejauhmana penguatan komitmen kebangsaan untuk membangun karakter warganegara pada masyarakat perbatasan.
- b. Bagi masyarakat perbatasan hendaknya lebih cinta tanah air dan bangsa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar senantiasa memperhatikan wilayah perbatasan.

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang pendidikan karakter untuk menambah wawasan pengetahuan, memperoleh pengalaman baru, serta menambah khasanah pustaka.

E. Struktur Organisasi Tesis

Sebagai pendahuluan, Bab 1 menyajikan latar belakang permasalahan, memberi konteks munculnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

Dalam Bab 11, disajikan kajian pustaka. Kajian pustaka berisi tentang diskripsi, analisis konsep, teori- teori dan penelitian terdahulu yang relevan mengenai komitmen kebangsaan, karakter warganegara masyarakat perbatasan.

Dalam Bab 111, mengenai metodologi penelitian menguraikan lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, pembahasan hasil penelitia: gambaran objek penelitian, gambaran umum hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V, Kesimpulan dan Rekomendasi.